

B. URUSAN WAJIB PELAYAN DASAR YANG DILAKSANAKAN**1. URUSAN PENDIDIKAN**

Penyelenggaraan urusan pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam pelaksanaan urusan yang diwadahi dalam program dan kegiatan untuk menunjang capaian indikator pendidikan, selain program dan kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) mengelola anggaran yang bersumber dari anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Urusan pendidikan juga dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Kecamatan Kertek.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp640.272.816.321,00 yang terdiri dari belanja langsung DINas Dikpora sejumlah Rp73.615.537.400,00, Anggaran BOS sejumlah Rp81.635.924.608,00, dan belanja tidak langsung sejumlah Rp484.361.354.313,00. Sedangkan Alokasi Anggaran pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp650.000.000,00 dan Kecamatan Kertek sebesar Rp10.000.000,00. Persentase anggaran urusan pendidikan sebesar **30,89%** dari alokasi APBD Tahun 2018.

Alokasi Belanja Langsung senilai Rp640.272.816.321,00 berhasil terealisasi sebesar 93,57% atau senilai Rp 599.119.792,00 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel IV.B.1.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	155.911.462.008	151.555.566.727	97,60
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.618.562.000	1.574.640.370	97,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.154.000	694.938.993	99,26
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.631.000.000	4.598.789.810	99,30
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	46.270.514.400	45.684.427.099	98,73
5	Program Pendidikan Menengah	665.000.000	655.757.000	98,61
6	Program Pendidikan Non Formal	2.264.000.000	2.228.146.200	98,42
7	Program Pendidikan Luar Biasa	320.000.000	303.523.500	94,85
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.641.880.000	14.608.533.500	99,77
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	910.000.000	892.333.510	98,06

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
10	Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	1.594.427.000	1.549.497.790	97,18
11	Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)	81.635.924.608	78.156.802.477	95,74
12	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	660.000.000.000	608.176.478	92,15
	Belanja Tidak Langsung	484.361.354.313	447.564.225.933	92,40
	Total Belanja	640.272.816.321	599.119.792.660	93,57

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kantor. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kantor. Pada tahun 2018, program ini digunakan untuk kegiatan Pembangunan aula kantor Dikpora, Pengadaan sarana prasarana kantor yang meliputi pengadaan meubelair, lemari rak buku kayu jati, backdrop 2 sisi, meja rapat, kursi tumpuk. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, dialokasikan anggaran untuk pengadaan : printer, LCD, dan komputer. Selain itu, program ini digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor guna meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

3) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan pendidikan lebih lanjut. Oleh karenanya Program Pendidikan Anak Usia

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain : pembangunan ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung , Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Penyediaan Bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD, Penunjang BOP PAUD DAK Non Fisik, Fasilitasi Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mendongeng.

Salah satu indikator kualitas penyelenggaraan PAUD adalah dengan terakreditasinya Lembaga penyelenggara PAUD. Di Kabupaten Wonosobo jumlah PAUD Formal yang telah terakreditasi belum cukup banyak. Sehingga diselenggarakan kegiatan- kegiatan yang dapat mendorong PAUD Formal untuk memenuhi standar layanan PAUD dan mendapatkan akreditasi. Kegiatan tersebut antara lain adalah Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Sosialisasi Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar yang disampaikan.

Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD dirancang untuk menstimulasi perkembangan anak-anak. Kegiatan Pengadaan APE PAUD diberikan kepada 10 lembaga PAUD yaitu PAUD Permata Hati, PAUD " AR RAZZAK, PAUD Ceria, PAUD Kuncup Mekar, PAUD Azzahra, PAUD Melati Club, PAUD Bahrul Ulum, PAUD Hidayatusibyan, PAUD Anggrek Tempuran, dan PAUD Bahari Nusantara.

Untuk menambah daya tampung siswa PAUD diselenggarakan kegiatan pembangunan ruang kelas PAUD di Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kepil, Kecamatan Garung, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Keajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kertek, Kecamatan Keajar. Selain itu juga diselenggarakan rehab ruang kelas berat, pembangunan gedung, pembangunan senderan dan pagar.

Dana Khusus Non Fisik Program PAUD dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD , dan Penunjang Penunjang BOP PAUD DAK Non Fisik dengan anggaran dikelola oleh Lembaga PAUD.

Mendongeng merupakan salah satu metode pembelajaran di jenjang PAUD, dimana guru PAUD diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada anak sehingga menginspirasi anak-anak dalam mengembangkan diri. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan mendongeng untuk mendorong kreatifitas dan kecakapan guru PAUD dalam mendongeng.

Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian APK PAUD sebesar 79,00% dan lembaga PAUD terakreditasi mencapai 62,00 %. Mengingat usia PAUD merupakan usia "golden age" bagi

perkembangan anak, maka kinerja di bidang ini harus terus didorong sehingga setiap anak usia PAUD dapat terlayani di lembaga-lembaga PAUD

4) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga program ini ditujukan untuk memperluas akses dan menguatkan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bagi SD dan SMP yaitu dengan kegiatan pembangunan senderan, pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SD dan SMP, pembangunan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP serta , pengadaan alat laboratorium. Upaya peningkatan mutu pembelajaran dilakukan melalui Pelatihan Penyusunan kurikulum, Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI, Fasilitasi model pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi SD.

Kegiatan Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran dialokasikan untuk pengadaan sarpras multimedia SD Muhammadiyah Sudagaran, Pengadaan Sarpras Tapak Suci SD Muhammadiyah Sudagaran dan Pengadaan Alat Kesenian SD 3 Wonosobo. Adapun untuk Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan dialokasikan untuk 18 Sekolah Dasar.

Pengadaan sarana penunjang pembelajaran meliputi pengadaan peralatan IPA scientific jenjang SMP di 19 Sekolah Negeri , pengadaan peralatan laboratorium IPA berbasis digital dan interaktif jenjang SMP di 13 sekolah, dan Pengadaan Peralatan Model Anatomi Biologi jenjang SMP di 13 sekolah. Pengadaan komputer dan laptop bagi sekolah diadakan untuk mendorong pengembangan kemampuan TIK bagi siswa dan juga sebagai sarana untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Ujian Nasional SMP/MTs merupakan metode untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang dilakukan oleh siswa SMP/ MTs selama 3 (tiga tahun). Moda Ujian Nasional terdiri dari 2 (dua) moda yaitu Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). UNBK di Kabupaten Wonosobo telah dirintis sejak tahun 2016 dimulai dari 7 SMP dan terus bertambah. Pada Tahun 2018, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/ MTs dialokasikan untuk penyelenggaraan UNBK dan juga Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) SMP karena belum seluruhnya berbasis UNBK. Selain itu anggaran tersebut juga digunakan untuk Validasi Pendataan Peserta Ujian, Penggandaan Kartu Peserta Ujian. Untuk Pendidikan Kesetaraan, kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dialokasikan untuk penyelenggaraan UNBK Paket B dan C.

Pada tahun Ajaran 2017/2018 Kabupaten Wonosobo untuk penyelenggaraan Ujian Nasional, memperoleh peringkat 13 dengan Hasil Rata-rata 58,20 dimana rata-rata Provinsi 54,36 dan Nasional 51,10. Hasil ini cukup menggembirakan namun masih memerlukan upaya-upaya lain terutama pasca kelulusan yaitu meningkatkan partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

5) Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah Provinsi. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SMA/SMK berupa Peralatan OR (matras) untuk SMK Andalusia 2 Kaliwiro dan pengadaan Komputer SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo.

Selain itu, kegiatan Pembangunan taman, lapangan, fasilitas parkir dan fasilitas lainnya dialokasikan untuk Pembangunan Paving dan Pagar SMK Andalusia 2 Kaliwiro, rehabilitasi saluran drainase SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo, dan Senderan dan Paving SMK Jalaluddin yang berlokasi di Desa Lancar Kecamatan Wadaslintang.

SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo juga mendapatkan alokasi anggaran untuk Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas. Adapun SMK Muhammadiyah 2 Wadaslintang, mendapatkan anggaran pembangunan ruang kelas baru.

6) Program Pendidikan Non Formal

Program ini diimplementasikan untuk meningkatkan Capaian Angka Melek Huruf 15-45 tahun di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, sertifikasi lembaga pendidikan non formal, fasilitasi penyelenggaraan ujian paket C dan Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan kejar paket A, paket B dan paket C. Penyelenggaraan Kegiatan Kejar Paket B dan C dengan mekanisme kerjasama antara Desa dan PKBM. Pada tahun 2018 20 Desa dan PKBM melaksanakan MOU untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan kesetaraan. Mekanisme kerjasama tersebut mengatur tentang tugas PKBM sebagai penyelenggara Kegiatan dengan memfasilitasi Buku pelajaran, ATK dengan sumber anggaran dari dana APBD Kabupaten, sedangkan honor tutor bersumber dari Dana Desa.

7) Program Pendidikan Luar Biasa

Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, diselenggarakan kegiatan implementasi sekolah Inklusi. Layanan pendidikan inklusi berarti menyertakan semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam proses pembelajaran yang sama.

Kegiatan ini menasar pada SD dan SMP yang menerapkan sistem inklusi yaitu dengan kegiatan Pengembangan sekolah inklusi SD, SMP dan Pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Terdapat 9 Sekolah yang mendapatkan bantuan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.

Kegiatan Pengembangan Sekolah Inklusi Tahun 2018 merupakan keberlanjutan dari pengembangan kegiatan inklusi tahun 2017 dimana kegiatan tersebut sudah memasuki tahap identifikasi dan assessment ABK, penyusunan RPP yang disesuaikan dengan Siswa ABK, juga Praktek pembelajaran untuk siswa ABK, kegiatan diikuti oleh 60 Guru SD dan SMP. Hasil dari Kegiatan ini akan dirumuskan Surat Keputusan Bupati untuk menentukan SD dan SMP mana yang ditunjuk sebagai Sekolah Inklusi sehingga setiap Kecamatan terdapat 1 SD dan SMP sebagai pilot project, namun tidak menutup kemungkinan sekolah lain juga berhak menerima siswa ABK.

8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan penggerak utama dalam keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pendidik di antaranya adalah untuk meningkatkan persentase pendidik SD dan SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui Pembinaan Kelompok kerja guru, Fasilitasi Kegiatan Penilaian Tindakan Kelas, Pengembangan mutu dan kualitas program dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Profesi Guru, Fasilitasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Non PNS Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan seleksi calon kepala sekolah dikdas. Adapun Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan digunakan untuk pengadaan server kepegawaian.

Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan, diselenggarakan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang kemudian dikirimkan ke tingkat provinsi dan nasional.

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian kinerja di bidang pendidikan. Beberapa kegiatan diselenggarakan melalui program ini, salah satu di antaranya adalah pengembangan Program Sekolah Ramah Anak di mana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), diselenggarakan kegiatan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Wonosobo yaitu dengan melalui *Pilot Project* sekolah ramah anak yang diwujudkan dengan pembangunan prasarana pendukung pembangunan ruang kantin sekolah di SDN Candiyan dan Pembangunan Gasebo SMP 4 Kertek.

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diselenggarakan juga untuk mendukung penguatan Dewan Pendidikan sebagai badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan diselenggarakan kegiatan Forum Diskusi Pendidikan, penyusunan Kajian Publik tentang Pendidikan, Seleksi dewan pendidikan dan monitoring kegiatan dewan pendidikan.

Data merupakan salah satu unsur mendasar dalam perencanaan bidang pendidikan. Oleh karenanya salah satu kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah Manajemen Pendataan Pendidikan yang salah satu keluarannya adalah Profil Pendidikan Tahun 2018, rangkuman data kecamatan dan Data Pokok Pendidikan yang memberikan gambaran capaian kinerja di bidang pendidikan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan di bidang pendidikan dasar, dilaksanakan kegiatan Regrouping Sekolah. Kriteria untuk penggabungan SD dalam lokasi yaitu berjarak kurang dari 200 m, 2 (dua) SD atau lebih yang berlokasi dalam satu kompleks, jumlah rombongan belajar tidak melebihi jumlah ruang kelas yang ada. Sedangkan untuk SD kecil yaitu memiliki siswa kurang dari 120 Anak, dua SD atau yang berjarak kurang dari 3 KM, dan tidak ada hambatan akses permanen. Pada tahun 2018 penggabungan SD meliputi :

- SD Negeri 2 Wonosobo dan SD Negeri 3 Wonosobo nomenklatur menjadi SD Negeri 2 Wonosobo
- SD Negeri 1 Wonosobo SD Negeri 4 Wonosobo nomenklatur menjadi SD Negeri 1 Wonosobo
- SD Negeri 5 Wonosobo SD Negeri 6 Wonosobo nomenklatur menjadi SD Negeri 5 Wonosobo
- SD Negeri 7 Wonosobo SD Negeri 9 Wonosobo SD Negeri 10 Wonosobo nomenklatur menjadi SD Negeri 10 Wonosobo
- SD Negeri 1 Wonosroyo SD Negeri 2 Wonosroyo nomenklatur menjadi SD Negeri 1 Wonosroyo
- SD Negeri 1 Adiwarno SD Negeri 2 Adiwarno nomenklatur menjadi SD Negeri 1 Adiwarno

10) Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SD berakreditasi minimal B, Persentase SMP I Berakreditasi minimal B, Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD, Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP,.

Kegiatan Penguatan kurikulum berbasis keunggulan local dan entrepreneurship untuk mendukung revolusi mental dan karakter bangsa melalui Bintek Entrepreneurship tingkat SMP. Untuk meningkatkan persentase satuan pendidikan dasar terakreditasi B tahun 2018 dialokasikan anggaran untuk kegiatan akreditasi satuan pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan .

Tahun 2018 penilaian akreditasi dilakukan kepada 108 Sekolah. Hasil akreditasi jenjang SMP/MTs menghasilkan 29 SMP/MTs mendapat nilai B sejumlah 12, 17

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

SMP/MTs mendapat akreditasi. Sedangkan jenjang SD/MI, dari 88 SD/MI yang mendapat akreditasi A sejumlah 22, dan B sejumlah 66.

11) Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)

Program ini bertujuan untuk penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penyaluran BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah, dan dilakukan pencatatan pada rekening daerah. Untuk memantau dan mendampingi pengelolaan dana BOS yang dikelola oleh satuan pendidikan, diselenggarakan kegiatan Fasilitasi Pendampingan BOS yaitu yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Wonsoobo.

Alokasi anggaran Kegiatan Belanja Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh 476 SD terdiri dari 461 SD Negeri dan 15 SD Swasta sedangkan untuk SMP dikelola oleh sejumlah 103 SMP terdiri dari 72 SMP Negeri dan 31 SMP Swasta.

12) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini untuk meningkatkan rata-rata Kemampuan membaca cepat anak SD, SMP dan SMA. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan membaca cepat dilaksanakan melalui Seminar tentang Teknik Membaca Cepat, Lomba / Kompetisi Baca Cepat di Kalangan Pelajar SD, SMP dan SMA. Untuk Meningkatkan Minat Budaya Baca dan Kreativitas di Kalangan Pemustaka Pelajar pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca melalui Workshop/Bintek Fotografi, Workshop Beatbox, Workshop Read Aloud 1 dan Read Aloud 2. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi pengembangan perpustakaan dilaksanakan di Desa Bejiarum dan Karangluhur.

c. Capaian kinerja

Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.B.1.2
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	
1	APM SD	%	98,18	96,5	98,57	102,15	0	97,95
2	APK SD	%	109,68	103,75	110,3	106,31	0	103,5
3	APM SMP	%	76,55	80,77	75,97	94,06	◇	90

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	
4	APK SMP	%	99,24	100,18	110,3	110,1	0	100
5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	%	93,05	87,84	93,13	106,02	0	90
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	%	99,5	97,01	106,79	110,08	0	99
7	Angka Putus Sekolah SD	%	0,05	0,064	0,07	109,38	0	0,04
8	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,55	0,19	0,46	242,11	0	0,07
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya		0,86	0,7	0,9	128,57	0	0,9
10	Angka Kelulusan (AL) SD	%	99,9	99,53	99,02	99,49	◇	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	99,94	100	99,94	99,94	◇	100
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	%	93,61	95,93	98	102,16	0	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	76,55	79,24	99,94	126,12	0	86,95
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	%	75	74,8	80	106,95	0	88%
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	%	80	80,8	82	101,49	0	88%
16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	%	98,18	79	98,25	124,37	0	85%
17	% PAUD formal yang terakreditasi	%	60	35	62	177,14	0	80%

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	
18	APK PAUD	%	59,03	42,36	79	186,5	0	49,9
19	Persentase SMK minimal berakreditasi B	%		61%	DTT		Δ Δ Δ Δ	70%
20	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%	20	24	25	104,17	0	50%
21	Angka Melek Huruf Penduduk 15-45 tahun	%	98,31	98,97	99	100,03	0	99,99
22	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	89,87	84,47	92,01	108,93	0	100
23	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	93,59	96,44	93,98	97,45	◇	100
24	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	%	48	52,8	51,8	98,11	◇	60
25	persentase SD berakreditasi B	%	95,85	87,2	96,87	111,09	0	95
26	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	%	75,49	83,5	76,7	91,86	◇	90
27	Persentase SMA minimal berakreditasi B	%	87,5	82,4	87,5	106,19	0	85
28	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	%	7,37	7,32	7	95,08	◇	7,5
29	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	%	5,6	6,5	5,48	84,38	◇	7
30	Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	%	5,1	6,4	DTT		Δ Δ Δ Δ	7
31	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	%	1,24	1,36	3,11	228,68	0	2,6

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	
32	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	%	2,77	2,2	14,56	661,82	0	5,4
33	Persentase Sekolah yang website memiliki aktif	%	55%	45%	55%	122,22	0	75
34	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)		42,71	39,71	42,71	107,55	0	35
35	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)		40,57	34	40,57	119,32	0	32
36	Rasio Guru/ Murid SMA (jumlah guru PNS SMA per 1000 murid SMA)		32,3	38	DTT		Δ Δ Δ Δ	32
37	Persentase Sekolah Ramah Anak		2	6	7,69	128,17	0	20

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - 99,99%
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
Δ Δ Δ Δ	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Secara umum capaian kinerjajaurusan pendidikan telah mencapai target yang ditentukan dan terdapat peningkatan. Pada jenjang PAUD terdapat 2 (dua) jenis layanan PAUD berdasarkan jenjang usia layanan yaitu 0-4 tahun dan 4-6 tahun. Pencapaian Kinerja yang tercermin dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD untuk jenis layanan anak usia 0-4 tahun pada Tahun 2018 sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang mengikuti pendidikan di PAUD untuk usia 0-4 tahun (Kelompok Bermain, Pos PAUD, Satuan PAUD Sejenis, yang berada di semua kecamatan se- Kabupaten Wonosobo. Hal ini didukung pula dengan adanya peningkatan PAUD Formal yang terakreditasi. Peningkatan APK ini merupakan cerminan dari upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dalam melakukan advokasi dan sosialisasi dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat, desa, kelompok PKK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih mengenai arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun atau penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2017 sebesar 99.5% dan pada tahun 2018 sebesar 106.85%. Capaian yang melebihi 100% diperkirakan karena terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang bukan penduduk Wonosobo, terutama siswa yang bersekolah di sekolah berasrama yang biasanya datang dari luar daerah. Untuk angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2017 sebesar 93.05% dan pada tahun 2018 sebesar 92, 98 % dilihat dari itu terjadi penurunan. Sedangkan untuk APM SMP mengalami penurunan ini dikarenakan lulusan SD/MI masih banyak usia yang kurang dari 13 tahun dan juga penduduk Wonosobo usia 13-15 cukup banyak yang bersekolah diluar Kabupaten Wonosobo. Situasi ini memerlukan perhatian dan kerja keras dari seluruh stakeholder terkait. Semua sektor harus mampu bekerjasama dengan baik, untuk mendukung siswa-siswa lulusan SD untuk melanjutkan di jenjang SMP sederajat.

APK merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK jenjang Pendidikan Dasar bisa dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo. Capaian APK SD/MI sebesar 106.31% dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Capaian APK SMP/MTs baru mencapai 99,72%. Situasi ini perlu direspon melalui kerjasama lintas pihak dalam memotivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

Pada sisi lain masih terdapat anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Data yang ada menunjukkan masih terdapat angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,07% dan 0,46% di jenjang SMP. Pada jenjang SD dan SMP terdapat peningkatan Angka Putus Sekolah, sehingga perlu penanganan yang lebih serius dari semua pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini. Permasalahan putus sekolah dilatarbelakangi oleh berbagai hal antara lain ekonomi, motivasi atau beberapa kasus pernikahan dini. Oleh karenanya perlu penanganan multipihak untuk menekan angka putus sekolah. Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Program Indonesia Pintar dari pemerintah pusat untuk menekan Angka Putus Sekolah harus dimanfaatkan secara optimal dengan penguatan pengawasan penggunaan anggaran tersebut.

Persentase minimal kelulusan jenjang SD/MI, telah mencapai target yang ditetapkan. RPJMD menetapkan 99.53% kelulusan tingkat SD/MI, realisasi 99.49% siswa SD/MI yang mengikuti ujian Nasional berhasil lulus. Di jenjang SMP/MTs, kelulusan belum mencapai target RPJMD dari 100% realisasi capaian sebesar 99.94%. Angka melanjutkan dari jenjang SD/ MI ke jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017, namun demikian kondisi ini tetap menuntut adanya upaya yang lebih intens dengan melibatkan multi sektor untuk meningkatkan motivasi siswa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs.

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Upaya pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah ditunjukkan dengan peningkatan persentase ruang kelas yang telah memenuhi standar nasional dan berakreditasi minimal B. Pada tahun 2018 persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan sebesar 80% sedangkan pada tingkat SMP 82%. Dari sisi tenaga pendidik, persentase tenaga pendidikan dengan kualifikasi pendidikan DIV/S1 dan bersertifikat pendidik pada tingkat SD mengalami peningkatan dari 89,87 % pada tahun 2017 menjadi 92,01 % pada tahun 2018 dan untuk tingkat SMP mengalami peningkatan 0,28%.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.B.1.3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Perkembangan kurikulum pendidikan dasar masih harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat sesuai diklat yang diikuti	- Penyelenggaraan atau pengiriman Diklat teknis maupun karid pendidik dan tenaga kependidikan dengan sistem "bergulir", di mana pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat wajib menyampaikan hasil diklat yang diperoleh ke kelompok-kelompok seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG)
2	Keterbatasan guru PNS dan Kepala Sekolah sehingga proses pelayanan pendidikan kurang maksimal.	- Penggabungan Sekolah Negeri baik SD maupun SMP dengan prioritas : a. lokasi sekolah yang berdekatan yaitu berjarak kurang dari 200 m, b. 2 (dua) SD atau lebih yang berlokasi dalam satu kompleks, j c. jumlah rombongan belajar tidak melebihi jumlah ruang kelas yang ada. d. Sedangkan untuk SD kecil yaitu memiliki siswa kurang dari 120 Anak, dua SD atau yang berjarak kurang dari 3 KM, dan tidak ada hambatan akses permanen
3	Masih terdapat perbedaan kualitas dan mutu layanan pendidikan antar satuan pendidikan	- Pengembangan pembangunan pendidikan berbasis zonasi untuk menghilangkan terminologi sekolah favorit hanya pada beberapa sekolah. - Diikuti dengan pengembangan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia untuk mendukung zonasi pendidikan.
4.	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang berkelanjutan	- Penyusunan grand desain sarana dan prasarana pendidikan

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

5	Masih terdapat angka putus sekolah dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih perlu ditingkatkan	- Kerjasama multi stakeholder untuk mendorong anak-anak usia sekolah mengikuti pendidikan di sekolah formal; - Pencegahan lapangan kerja bagi pekerja anak; - Pengembangan skema-skema stimulan dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
6	Selain meningkatkan akses bagi warga belajar pendidikan kesetaraan, kualitas layanan pendidikan non formal harus menjadi prioritas	- Meningkatkan kualitas tutor agar sesuai dengan standar layanan pendidikan non formal - Penyediaan regulasi standar penyelenggaraan pendidikan non formal - Mendorong akreditasi Lembaga penyelenggara pendidikan non formal
7	Kualitas keselarasan perencanaan di satuan pendidikan dan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih harus dipertajam	- Penyelenggaraan forum bidang pendidikan untuk keselarasan program di tingkat kabupaten, dinas dan satuan pendidikan - Pendampingan penyusunan perencanaan di satuan pendidikan